



**DOKUMEN
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021**

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BULELENG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 dalam melaksanakan tupoksi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si

NIP. 19741014 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	2
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3
Kabupaten Buleleng.....	4
BAB II RENCANA STRATEGIS	5
2.1 Visi.....	5
2.2 Misi.....	5
2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	6
2.4 Indikator dan Target Kinerja.....	10
2.5 Strategi dan Kebijakan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	11
2.5.1 Identifikasi faktor-faktor SWOT	11
BAB III PENUTUP	20
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka upaya mewujudkan Good Governance, pengembangan dan informasikinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasiskinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dankebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerjaSKPD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah).

Salah satu instrument SAKIP yang dipergunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari masing-masing SKPD guna penguatan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan sebagai bentukkomitmen SKPD dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahunesuai dengan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2022. Rencana Strategis Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi.
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif.
- d. Transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
- d. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan SKPD yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam Rencana Strategis Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk dijabarkan ke dalam rencana Kerja serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja. Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

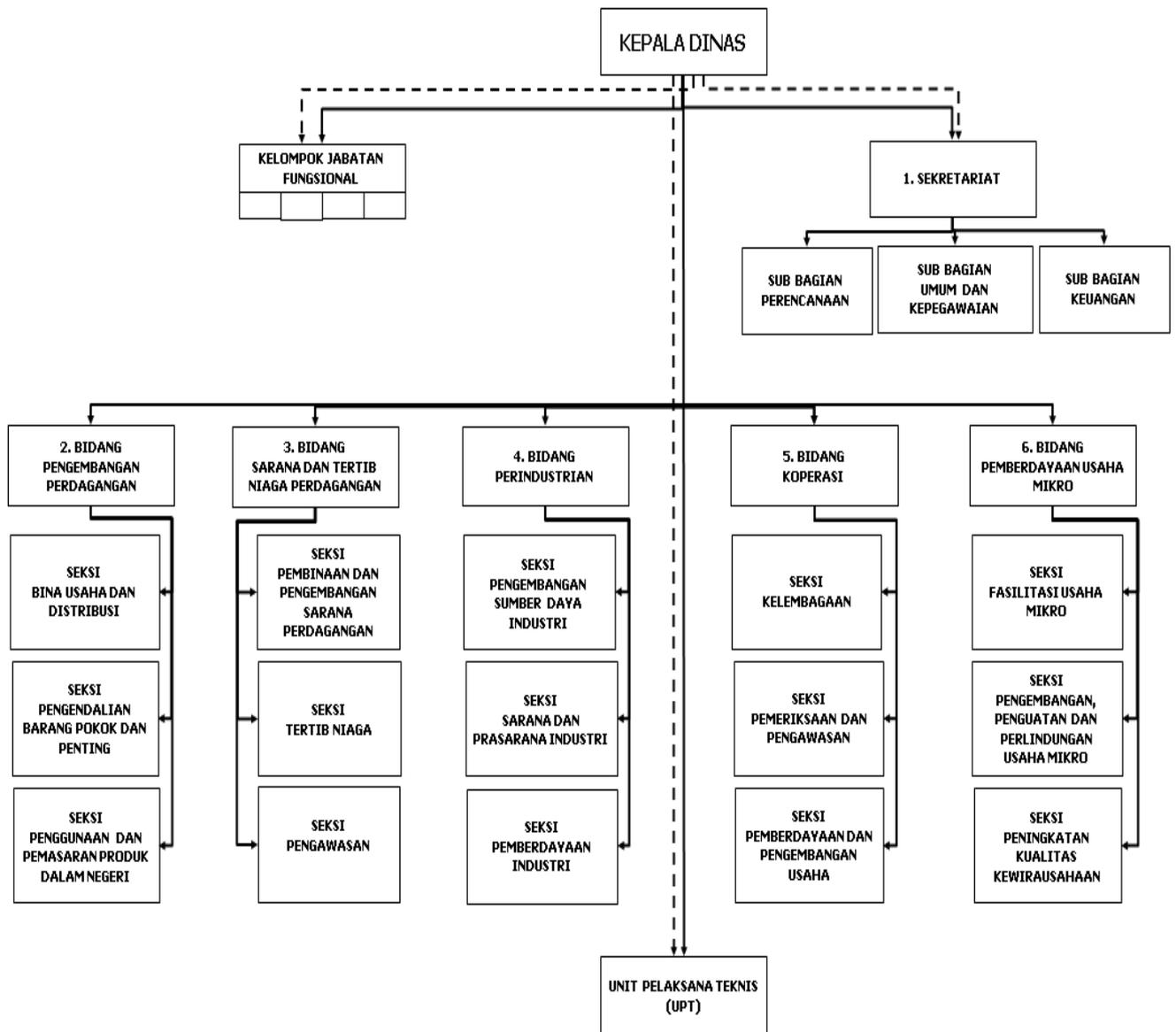
2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan dan bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng

Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020, terdiri dari :



BAB II

RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegritas dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Rencana Strategis Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017–2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

2.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta para pemangku kepentingan maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, Pemerintah Daerah mencanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**.

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Demikian juga SKPD Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai kewajiban untuk mewujudkannya melalui perumusan Visi yang searah dan selaras dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten

Buleleng untuk 5 tahun kedepan sebagaimana di uraikan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*sustainable development*).

Mencermati Misi dimaksud, maka menjadi kewajiban bagi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk menjabarkan sesuai Tupoksinya yang berada di point kedua dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022.

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, maka disusun dan dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Mencermati dari tugas pokok serta rumusan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun ke depan 2017-2022. Tujuan dan sasaran Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terdapat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

No	Kinerja Utama atau Tujuan/ Sasaran Strategis/ Hasil (outcome)	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Berkembangnya Produk Unggulan Daerah	Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM, Koperasi, Kelompok Pedagang	Persentase kelompok binaan yang berhasil	74.74 %	75.29%	-	-	-
		Berkembangnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB	73,00 %	76,00%	-	-	-
2	Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	85%	85,5%	-	-	-
			Persentase Pertumbuhan UMKM	4,77%	4,78%	-	-	-
3	Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	-	-	78 pasar	81 pasar	84 pasar
			Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	-	-	54,91%	55%	56%
			Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	-	-	80%	81%	82%
		Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase IKM yang Berijin	-	-	1,50%	1,50%	1,50%
			Persentase IKM yang Meningkatkan Statusnya	-	-	1,50%	1,50%	1,50%

No	Kinerja Utama atau Tujuan/ Sasaran Strategis/ Hasil (outcome)	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
		Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	-	-	-	76,79%	77,74%
		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	-	-	-	77,5%	78%
		Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	-	-	25%	26%	27%
			Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	-	-	1%	1,3%	1,5%
		4	Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	-	-	78 pasar
Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	-				-	54,91%	55%	56%
Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	-				-	80%	81%	82%
Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM			-	-	-	80%	81%

No	Kinerja Utama atau Tujuan/ Sasaran Strategis/ Hasil (outcome)	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
		Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	-	-	-	76,79%	77,74%
		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	-	-	-	77,5%	78%
		Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	-	-	25%	26%	27%
			Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	-	-	1%	1,3%	1,5%

2.4 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan SAKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja (RKT) Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2021 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan.

2.5 Strategi dan Kebijakan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Strategi pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pembangunan bidang Perdagangan, Perindustrian, koperasi dan Pengembangan Usaha Mikro serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu (5 tahun). Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menetapkan strategi pembangunan dengan memfokuskan pada upaya-upaya pengalokasian penanganan masalah - masalah Perdagangan dan Perindustrian yang mendesak/urgen dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk terwujudnya keadaan Buleleng yang "SMILE" Sejahtera, Mandiri, Intregasi, Lestari dan Beretika.

2.5.1 Identifikasi faktor-faktor SWOT

Dalam merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan instrumen analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats / tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strengths) :

1. Tersedianya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
2. Adanya potensi SDM, kelembagaan serta teknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
3. Adanya alokasi dana untuk kegiatan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;

b. Kelemahan (Weaknesses) :

1. Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia;
2. Penyediaan stok bahan pokok dalam jangka waktu tertentu untuk menghadapi hari-hari besar keagamaan terutama pada saat

- lebaran, natal dan tahun baru belum tersedia, bila permintaan meningkat, sehingga harga kebutuhan pokok cenderung naik;
3. Masih lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;
 4. Masih banyaknya pasar yang kurang representatif.
 5. Terbatasnya penggunaan teknologi modern dan tepat guna dalam sektor industri;
 6. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi;
 7. Belum optimalnya kelembagaan yang didukung pemberdayaan koperasi;
 8. Terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, pasar, informasi, lokasi usaha dan jaringan kerja kemitraan;

c. Peluang (*Opportunities*) :

1. Adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
2. Adanya kesamaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM;
4. Adanya keanekaragaman produk UKM/IKM yang tersebar;
5. Banyaknya tingkat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa;
6. Produk yang dihasilkan IKM mempunyai nilai ekonomis dan daya jual yang tinggi;
7. Besarnya potensi Koperasi, UKM, industri dan perdagangan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi;

d. Ancaman (*Threats*) :

1. Tingginya keinginan masyarakat terhadap produk luar negeri;
2. Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain;
3. Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global;
4. Rendahnya Mutu Produksi IKM/UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil;

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatifstrategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT.Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatifstrategi yang dapat ditempuh, yaitu :

- Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
- Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

➤ Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">Lingkungan Internal (IFAS)</p> <p style="text-align: center;">Lingkungan Eksternal (EFAS)</p>	<p><u>Kekuatan (Strengths) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng; • Adanya potensi SDM, kelembagaan serta teknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; • Adanya alokasi dana untuk kegiatan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; 	<p><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia; • Penyediaan stok bahan pokok dalam jangka waktu tertentu untuk menghadapi hari-hari besar keagamaan terutama pada saat lebaran, natal dan tahun baru belum tersedia, bila permintaan meningkat, sehingga harga kebutuhan pokok cenderung naik; • Masih lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa; • Masih banyaknya pasar yang kurang representatif. • Terbatasnya penggunaan teknologi modern dan tepat guna dalam sektor industri; • Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi; • Belum optimalnya kelembagaan yang didukung pemberdayaan koperasi; • Terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, pasar, informasi, lokasi usaha dan jaringan kerja kemitraan;
--	--	---

<p><u>Peluang (Opportunities) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan; • Adanya kesamaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; • Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM; • Adanya keanekaragaman produk UKM/IKM yang tersebar; • Banyaknya tingkat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa; • Produk yang dihasilkan IKM mempunyai nilai ekonomis dan daya jual yang tinggi; • Besarnya potensi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi; 	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan insentif maupun akses perbankan; • Menjaga dan meningkatkan komitmen dan motivasi aparatur untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pelaku usaha dibidang Perdagangan , Perindustrian, Koperasi, UKM; • Memanfaatkan anggaran pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan secara optimal; 	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur, sarana dan prasarana pelayanan; • Meningkatkan pemantauan harga dan operasi pasar murah khususnya pada Hari Besar Keagamaan; • Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pasar serta peredaran barang dan jasa; • Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui revitalisasi pasar; • Melakukan indentifikasi potensi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM; • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan berbasis teknologi dalam mengelola usaha; • Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi melalui kegiatan diklat perkoperasian; • Meningkatkan promosi produk dalam negeri dan berpartisipasi dalam kegiatan pameran di tingkat nasional atau internasional;
<p><u>Ancaman (Threats) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya keinginan masyarakat terhadap produk luar negeri; • Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain; • Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global; • Rendahnya Mutu Produksi IKM/UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil; 	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kualitas produksi dalam negeri; • Mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk membuka usaha-usaha produktif yang mampu menampung tenaga kerja; • Mengoptimalkan peranan seluruh komponen masyarakat dalam pasar global; • Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan sosial masyarakat bahwa sektor informal dan formal pada bidang potensi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM dapat menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat, sehingga menarik pemodal untuk berinvestasi pada bidang ini 	<p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong SKPD untuk menyediakan data dan informasi yang handal dan akurat sesuai Tupoksinya. • Meningkatkan koordinasi kepada instansi vertikal dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM; • Meningkatkan mutu produk UKM sehingga mampu bersaing dalam era pasar global; • Mengembangkan potensi IKM/UMKM dengan mempersiapkan SDM yang handal untuk menghadapi pasar global; • Mensosialisasikan penggunaan produk dalam negeri;

	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan penerapan program dan kebijakan yang melindungi produk dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada IKM;
--	---	--

Berdasarkan matriks SWOT tersebut di atas, maka diperoleh strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Strategi 1 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Perdagangan

Kebijakan :

- a) Pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen;
- b) Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi eksportir;
- c) Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat.

2. Strategi 2 : Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah

Kebijakan :

- a) Peningkatan fasilitas dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah;
- b) Peningkatan Kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi lainnya untuk memperkuat perekonomian daerah;
- c) Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

3. Strategi 3 : Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kebijakan :

- a) Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan koperasi dan UKM yang mandiri dan professional;
- b) Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro, dan menengah (UMKM) yang berbasis ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- c) Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia Koperasi Usaha Kecil dan menengah (KUKM), pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel T-C.26. di bawah ini

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana		
Misi II	: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM yang Berdaya Saing	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Perdagangan	<p>a) Pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen;</p> <p>b) Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi eksportir;</p> <p>c) Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat.</p>
	Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah	<p>a) Peningkatan fasilitas dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah;</p> <p>b) Peningkatan Kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi lainnya untuk memperkuat perekonomian daerah;</p> <p>c) Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.</p>
	Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah		

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana		
Misi II	: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	a) Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan koperasi dan UKM yang mandiri dan professional; b) Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro, dan menengah (UMKM) yang berbasis ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); c) Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia Koperasi Usaha Kecil dan menengah (KUKM), pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM.
	Terwujudnya UMKM yang Mandiri		

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini merupakan komitmen Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing-masing bidang dilingkungan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si ✍

NIP. 19741014 199311 1 001



LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	77,50%	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)	65.864.830	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<p>Jumlah dokumen permohonan ijin usaha simpan pinjam</p> <p>Jumlah dokumen permohonan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas</p> <p>Jumlah berkas pembubaran koperasi</p> <p>Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek pembuatan laporan tahunan koperasi</p> <p>Jumlah monev pemberdayaan koperasi</p> <p>Jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang di analisis datanya</p>	65.864.830	

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		310.900.622	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus / pengelola koperasi yang mengikuti diklat	310.900.622	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Koperasi dengan SDM yang Berkompeten	107.078.425	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi dengan bantuan modal dari pihak ketiga Jumlah koperasi yang memasarkan produk usaha Jumlah koperasi produksi, koperasi konsumsi dan koperasi jasa lainnya	107.078.425	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian RAT (Rapat Anggota Tahunan) tepat waktu	222.569.682	Pengawasan Kesehatan, Ketangguhan, Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang berkembang sesuai dengan regulasi	222.569.682	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian ART (Anggaran Rumah Tangga)	67.804.324	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai tingkat kesehatannya Jumlah monev kelembagaan koperasi dan usaha koperasi	67.804.324	
	Persentase UMKM yang Formal	26%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang berijin lengkap Jumlah pelaku UMKM yang Bersertifikat	206.724.200	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UMKM yang difasilitasi akses penerbitan IUMK melalui OSS	206.724.200	

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket		
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Meningkat Statusnya	1,3%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Jumlah dokumen UMKM terdata Online Data Sistem (ODS)	581.314.950	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah database UMKM Kabupaten Buleleng	88.476.945			
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah UMKM yang memanfaatkan Modal Luar	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mendapatkan dukungan informasi penyediaan permodalan	57.221.980		
								Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UMKM yang di diklat	227.506.000		
								Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah central UMKM yang dibina	208.110.025		
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah sarana dan prasarana UMKM yang memadai	57.521.100	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah produk UMKM yang difasilitasi akses pemasarannya	57.521.100	
						Jumlah Produk UMKM	Jumlah UMKM yang memanfaatkan IT					

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	81 Pasar	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemahaman dan fasilitasi mengenai tertib niaga	150.467.580	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Unit Usaha yang dibina dan difasilitasi Kegiatan Tertib Niaga	150.467.580	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana Distribusi yang kondisi baik	676.651.880	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah laporan pemberian rekomendasi pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan	676.651.880	
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		45.639.050	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah sub distributor stok barang kebutuhan pokok barang penting	45.639.050	
	Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	55%	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah monev/pemantauan ketersediaan barang, pasokan barang, harga barang pokok dan penting yang sesuai ketentuan	86.611.280	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah data pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	86.611.280	
							Jumlah data pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting			

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket			
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	272.101.355	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk unggulan daerah	272.101.355				
					Jumlah promosi produk unggulan daerah yang sesuai ketentuan			Jumlah promosi produk lokal/unggulan daerah					
	Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	81%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat UTTP (Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya) yang Ditera dan Tera Ulang	215.158.790	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP (Takar, Ukur, Timbang dan Perlengkapannya) bertera ulang	215.158.790				
					Pesentase Pelayanan K metrologian					Jumlah BDKT yang diawasi			
					Indeks Kepuasan Masyarakat			82.526.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			82.526.000	
					Jumlah Temuan BDKT/ B2 Ditindaklanjuti						Jumlah UTTP yang diawasi		
					Jumlah UTTP Bertera Sah								

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	80,00%	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian izin usaha kewenangan Kabupaten	161.426.560	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang terfasilitasi permohonan pemenuhan komitmen	161.426.560	
					Jumlah IKM yang terdata pada SIINas			Persentase ijin yang dipantau		
					Persentase Jumlah ijin yang diterbitkan dan di awasi			Jumlah data IKM yang sudah di olah dan dianalisis		
								Jumlah IKM yang terpublikasi pada SIINas		
								Jumlah laporan money SIINas		
	Jumlah IKM/sentra yang mendapat fasilitasi sarana dan prasarana									

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB	76,79%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan pembangunan industri	359.412.670	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen RPIK	148.193.370	
					Jumlah sentra/IKM yang mendapat dampingan					
					Jumlah laporan monev kegiatan pembangunan industri					
					Jumlah Dokumen RPIK, pelaksanaan kegiatan dan laporan monev		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM/sentra yang mendapat fasilitasi sertifikasi dan promosi	211.219.300	
PROGRAM PENUNJANG										
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Dinas	101.694.576	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	101.694.576	
								Jumlah dokumen SAKIP		
								Jumlah dokumen SOP dan SP		
								Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD		

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang akuntabel	5.746.648.761	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	5.712.832.935	
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		33.815.826	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perkantoran	212.961.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	72.800.000	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah laporan tata kelola administrasi perkantoran SKPD	58.022.200	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	6.387.500	
							Fasilitasi Kunjungan Tamu		15.624.000	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60.128.000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	635.688.596	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		42.037.897	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		181.360.000	
					Jumlah dokumen administrasi kepegawaian		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		239.223.334	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		173.067.365	

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen administrasi perkantoran	140.153.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	111.333.900	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		28.820.000	
Total						10.506.920.831			10.506.920.831	

Singgaha, 29 Oktober 2021
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si
NIP. 197410141993111001

